
Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango

Rizka Yunika Ramly^{1*}, Kartini Muslimin¹

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
*ikhayunika@gmail.com**

Article History:

Received : 25-07-2025

Accepted : 31-07-2025

Keywords:

Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Rasio Keuangan; Efektivitas PAD; Efisiensi Belanja; Bone Bolango

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango dengan menggunakan empat rasio keuangan, yaitu Rasio Varians Pendapatan, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Varians Belanja, dan Rasio Efisiensi Belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil perhitungan rasio keuangan selama tiga tahun terakhir serta wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran, serta data primer melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Varians Pendapatan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dengan realisasi pendapatan yang semakin mendekati target. Rasio Efektivitas PAD meningkat dari 80% pada 2021 menjadi 103% pada 2023, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan asli daerah. Rasio Varians Belanja menunjukkan bahwa belanja daerah masih belum sepenuhnya terserap dengan baik, meskipun terdapat peningkatan dari -14% pada 2022 menjadi -5% pada 2023. Sementara itu, Rasio Efisiensi Belanja mengalami fluktuasi, dengan tingkat efisiensi yang tetap tinggi, mencapai 94% pada 2023, menandakan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan secara optimal.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui pengelolaan yang efisien dan transparan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal. Dalam hal ini, Badan

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) memegang peran kunci, terutama dalam proses penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Muindro Renyowijoyo (2013), anggaran di sektor publik memiliki peran yang strategis sebagai instrumen untuk mencapai target dalam periode tertentu. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, anggaran di sektor publik harus bersifat terbuka dan transparan agar dapat dievaluasi dan diperbaiki di masa mendatang. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan reformasi administrasi publik, termasuk dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penyusunan APBD juga menjadi pedoman utama dalam kebijakan alokasi dan distribusi sumber daya daerah. Badrudin (2017) menjelaskan bahwa APBD dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mencakup semua pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, APBD menjadi alat pengendali yang merefleksikan prioritas pembangunan daerah.

Kabupaten Bone Bolango, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam mengelola keuangannya. Dengan sumber daya yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang luas, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi sangat kritis. Analisis pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan. Penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan daerah melalui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan fokus pada aspek-aspek seperti realisasi pendapatan daerah, efisiensi penggunaan anggaran belanja, dan dampaknya pada pembangunan daerah.

Secara umum, realisasi keuangan yang mendekati atau melebihi anggaran yang dialokasikan dapat dianggap sebagai hal yang menguntungkan bagi pemerintah daerah, terutama jika realisasi tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan baik dan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan tabel laporan realisasi anggaran, terdapat beberapa fenomena menarik yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bone Bolango, yakni pada realisasi anggaran pendapatan, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren yang relatif stabil dengan persentase realisasi yang mendekati atau sedikit di bawah 100% dari anggaran yang dialokasikan. Namun, terdapat anomali pada tahun 2023 di mana realisasi pendapatan justru melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 101,27%. Fenomena ini bisa diindikasikan sebagai hasil dari peningkatan efisiensi pengumpulan pendapatan atau adanya sumber pendapatan tambahan yang tidak terduga. Kemudian untuk realisasi anggaran belanja, realisasi anggaran belanja mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, persentase realisasi belanja jauh di bawah 100%, yaitu hanya 85,32%, yang

menandakan adanya anggaran yang tidak terserap secara optimal. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan dalam pelaksanaan program atau proyek, penghematan yang tidak terencana, atau kendala administratif. Sedangkan di tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam realisasi belanja dengan mencapai 94,98% dari anggaran yang dialokasikan. Ini bisa mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, serta pemanfaatan yang lebih efektif dari sumber daya yang ada.

Perbedaan yang mencolok antara realisasi pendapatan dan belanja pada beberapa tahun tersebut mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Bone Bolango dalam menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Sementara realisasi pendapatan menunjukkan kinerja yang cukup baik, tantangan nyata terletak pada optimalisasi anggaran belanja. Fluktuasi ini menyoroti kebutuhan akan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran, pengendalian, dan pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang di teliti adalah bagaimana keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keseimbangan anggaran dan realisasi belanja pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bagaimana nilai rasio pendapatan dan belanja daerah pemerintah pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

Untuk menemukan data apa yang di perlukan, maka terlebih dahulu perlu menjelaskan definisi operasional indikator yang di gunakan dalam penelitian ini. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa dalam menganalisis rasio pendapatan Pemerintah, kita perlu menganalisis kinerja dengan menggunakan alat ukur berupa rasio.

Penelitian ini akan lebih terfokus dengan mengkonformasi hasil dari perhitungan rasio. Berikut tupoksi dari ketiga informan yang akan diwawancarai:

1. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD), sebagai pejabat utama yang memiliki kewenangan dan wawasan menyeluruh mengenai kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran daerah, Kepala BKPD adalah informan yang sangat penting. Beliau dapat memberikan penjelasan strategis mengenai pendapatan dan belanja daerah, serta alasan di balik keputusan anggaran.
2. Staf Perencanaan dan Penganggaran, staf yang terlibat dalam penyusunan dan perencanaan anggaran daerah memiliki pengetahuan detail mengenai proses perencanaan, alokasi anggaran, serta hambatan-hambatan dalam pencapaian target

pendapatan dan belanja. Informasi mereka akan sangat berguna untuk memahami proses di balik angka-angka anggaran yang ada.

3. Auditor Internal atau Bagian Pengawasan, auditor internal atau staf yang bertugas mengawasi dan memeriksa pelaksanaan anggaran akan dapat memberikan perspektif yang objektif tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Mereka juga dapat memberikan informasi terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi serta kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan pelaksanaan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Menurut Mahmudi (2016), Rasio Varians Pendapatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan antara target pendapatan yang telah direncanakan dengan realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar perbedaan antara anggaran pendapatan yang diestimasi dalam APBD dengan pendapatan yang benar-benar terealisasi.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio varians pendapatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023, tingkat akurasi antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan bervariasi. Pada tahun 2021, rasio varians pendapatan sebesar -5%, yang termasuk dalam kategori sangat rendah, menunjukkan realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Tahun 2022 mengalami rasio varians yang sangat kecil, yakni -0,03%, yang juga masuk kategori sangat rendah, menandakan realisasi pendapatan hampir sesuai dengan anggaran. Tahun 2023 menunjukkan rasio 1,27%, yang tetap dalam kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Staf Perencanaan dan Penganggaran, serta Auditor Internal pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah Bone Bolango telah berjalan dengan baik, dengan selisih antara anggaran dan realisasi yang tergolong sangat rendah. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 realisasi pendapatan sedikit lebih rendah dari target dengan varians -5% dan -3,17%, kondisi ini masih dalam batas wajar dan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kebijakan dan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan bisa melampaui anggaran sebesar 1,27%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi penerimaan anggaran. Untuk menjaga kondisi ini, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi, penyesuaian target, serta penguatan strategi optimalisasi pendapatan agar tetap realistis dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

Dari perspektif masyarakat, meskipun secara angka rasio varians pendapatan tergolong sangat rendah, mereka masih merasakan bahwa beberapa program pemerintah yang direncanakan atau dijanjikan tidak selalu terealisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi perencanaan anggaran belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Artinya, meskipun indikator teknis menunjukkan kinerja perencanaan yang baik, tetap diperlukan upaya penyelarasan antara perencanaan fiskal dengan implementasi

program yang berdampak nyata di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan varians pendapatan juga perlu diimbangi dengan perbaikan komunikasi publik, transparansi program, serta peningkatan akuntabilitas implementatif agar masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil dari perencanaan yang telah dilakukan.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektif Keuangan Daerah Otonomi adalah indikator yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sebenarnya di daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk melaksanakan tugasnya dianggap efektif jika rasio yang dicapai setidaknya mencapai 100%. Namun, semakin tinggi nilai rasio efektif, semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya (Halim, 2011).

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone Bolango, efektivitas penerimaan PAD menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2021, rasio efektivitas sebesar 80% yang dikategorikan sebagai kurang efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD masih jauh dari target. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 93%, masuk dalam kategori cukup efektif," yang artinya ada perbaikan dalam pencapaian target penerimaan PAD. Pada tahun 2023, rasio mencapai 103%, yang berarti realisasi PAD melebihi target dan masuk kategori sangat efektif. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi penerimaan PAD, baik dari sisi perencanaan maupun optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Peningkatan efektivitas penerimaan PAD Bone Bolango dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah mulai membuahkan hasil. Awalnya, pencapaian masih menghadapi tantangan akibat berbagai faktor eksternal, namun dengan pengawasan yang lebih ketat, optimalisasi sumber pendapatan, serta sosialisasi kepada masyarakat, efektivitas penerimaan semakin meningkat. Evaluasi dalam perencanaan anggaran juga bisa memastikan target yang lebih realistis dan fleksibel sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini dengan meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem pemungutan, serta menggali potensi pendapatan baru agar PAD terus tumbuh.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat pandangan bahwa meskipun ada perbaikan dalam sistem pemungutan PAD, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ruang untuk lebih maksimal dalam menggali potensi lokal. Beberapa potensi seperti pasar, UMKM, dan retribusi sektor informal dianggap belum tergarap secara optimal. Di sisi lain, masyarakat juga mulai merasakan peningkatan keteraturan dan ketertiban dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pengelolaan PAD.

Rasio Varians Belanja

Rasio Varians Belanja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi belanja daerah sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan perbedaan antara anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang terjadi, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase (Halim, 2016).

Berdasarkan hasil perhitungan rasio varians belanja, realisasi belanja daerah Bone Bolango cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi belanja mengalami selisih cukup besar dibandingkan anggaran yang direncanakan, menunjukkan adanya sisa anggaran yang tidak digunakan sepenuhnya. Selisih ini semakin melebar pada tahun 2022, menandakan bahwa belanja daerah masih belum optimal dalam penyerapan anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2023, terjadi perbaikan dengan selisih yang lebih kecil, menunjukkan bahwa pengelolaan belanja membaik dan lebih mendekati anggaran yang direncanakan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, realisasi belanja daerah Bone Bolango masih mengalami kendala dalam penyerapan anggaran, terutama akibat keterlambatan administrasi, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, serta adanya efisiensi dalam pengeluaran. Pada tahun sebelumnya, beberapa program mengalami penundaan, menyebabkan realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Namun, pemerintah daerah telah melakukan berbagai perbaikan, seperti meningkatkan koordinasi antar OPD, mempercepat proses pencairan dana, dan menyusun anggaran yang lebih realistis. Auditor juga menyoroti pentingnya disiplin dalam pelaksanaan anggaran agar tidak ada dana yang tidak termanfaatkan dengan baik.

Dari sudut pandang masyarakat, masih terdapat persepsi bahwa beberapa program pembangunan atau bantuan sosial yang direncanakan tidak selalu terlaksana atau hanya sebagian saja yang benar-benar dijalankan. Hal ini memperkuat temuan bahwa adanya varians belanja turut dirasakan dalam bentuk ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program di tingkat lapangan. Masyarakat juga mencatat adanya penundaan atau ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah dijanjikan dalam forum-forum seperti musrenbang. Ini menunjukkan bahwa walaupun dari sisi pengelolaan teknokratis rasio varians belanja mulai membaik, harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap ketercapaian program tetap tinggi dan menuntut konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2016), efisiensi belanja daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa optimal pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya untuk mencapai hasil atau output yang diinginkan. Efisiensi ini dilihat dari seberapa besar sumber daya (anggaran) yang digunakan untuk menghasilkan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah Bone Bolango mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, rasio efisiensi belanja mencapai 91%, yang masuk dalam kategori sangat efisien, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan secara optimal. Namun, pada tahun 2022, efisiensi belanja menurun menjadi 85%, yang dikategorikan sebagai efisien, menandakan adanya anggaran yang tidak terserap sepenuhnya. Pada tahun 2023, efisiensi belanja meningkat kembali menjadi 94%, tetap dalam kategori sangat efisien, yang

menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022, tren ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja, dengan hasil yang semakin optimal di tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara, penurunan efisiensi belanja pada tahun 2022 disebabkan oleh keterlambatan administrasi, perubahan kebijakan, dan beberapa program yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga anggaran tidak terserap secara optimal. Namun, pemerintah daerah segera melakukan perbaikan dengan mempercepat pencairan dana, meningkatkan koordinasi antar OPD, serta melakukan evaluasi berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Hasilnya, pada tahun 2023 efisiensi belanja kembali meningkat, menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga konsistensi ini dengan perencanaan yang lebih matang, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dari sisi masyarakat, terdapat pandangan bahwa meskipun program-program pemerintah mulai terasa manfaatnya, masih ditemukan sejumlah kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak yang sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan. Beberapa warga menyampaikan bahwa ada proyek yang terlihat besar secara anggaran, tetapi manfaatnya kurang merata atau tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa efisiensi belanja, meskipun secara angka menunjukkan kinerja yang baik, perlu juga diukur dari aspek kebermanfaatannya nyata dan pemerataan dampak pembangunan.

Pembahasan Rasio Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Rasio varians pendapatan digunakan untuk mengukur deviasi antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan rumus Mahmudi (2016), selisih antara realisasi dan anggaran dibagi anggaran lalu dikalikan 100%. Di Kabupaten Bone Bolango, tren tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan:

- **2021:** Realisasi lebih rendah dari anggaran sebesar -5%, mengindikasikan overestimasi atau dampak faktor eksternal seperti pandemi atau fluktuasi transfer.
- **2022:** Varians membaik menjadi -0,03%, mencerminkan perencanaan yang lebih realistis dan akurat.
- **2023:** Tercapai surplus sebesar 1,27%, menunjukkan keberhasilan dalam menggali pendapatan daerah atau adanya dana tambahan.

Wawancara dengan pejabat daerah mengonfirmasi bahwa varians masih dalam batas wajar. Peningkatan realisasi menunjukkan perbaikan dalam strategi dan kepatuhan pajak. Auditor internal juga menilai bahwa perencanaan pendapatan sudah cukup baik, meskipun disarankan mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan mengoptimalkan PAD.

Secara teori, varians yang rendah menunjukkan akurasi perencanaan yang baik (Mahmudi, 2016). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Sari dan Susanto (2019), yang menemukan bahwa daerah dengan perencanaan efektif cenderung memiliki rasio varians rendah. Keunggulan Bone Bolango adalah tercapainya surplus pada 2023, menandakan strategi pengelolaan pendapatan yang efektif dan adaptif.

Pembahasan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Analisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tren perbaikan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2023. Efektivitas PAD merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan daerah yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2011), efektivitas PAD mencerminkan kapasitas aktual fiskal daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri, tanpa bergantung penuh pada transfer pusat. Suatu daerah dikatakan efektif apabila realisasi PAD mencapai minimal 100% dari target.

Pada tahun 2021, realisasi PAD sebesar Rp90,5 miliar hanya memenuhi 80% dari target yang ditetapkan, dan oleh karena itu masuk kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan masih rendahnya optimalisasi potensi PAD akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, terbatasnya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, serta belum adanya inovasi signifikan dalam pengelolaan sumber PAD.

Tahun 2022, terjadi peningkatan efektivitas menjadi 93%, dengan realisasi sebesar Rp90,9 miliar dari target Rp97,7 miliar. Meskipun belum mencapai 100%, angka ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan, penyesuaian target yang lebih realistis, dan peningkatan sistem pemungutan maupun pelayanan pajak. Kategori ini masuk dalam klasifikasi cukup efektif dan menjadi indikator bahwa Pemerintah Kabupaten mulai mengatasi kesenjangan antara target dan potensi fiskal aktual.

Perbaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi PAD sebesar Rp126,1 miliar berhasil melampaui target Rp122,0 miliar, menghasilkan rasio efektivitas 103%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu memenuhi target, tetapi juga menunjukkan efisiensi dan inovasi dalam menggali pendapatan. Faktor pendukungnya antara lain digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kesadaran pajak masyarakat, dan koordinasi lintas sektor yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, peningkatan efektivitas PAD merupakan hasil dari perbaikan sistem pengawasan, sosialisasi kepada wajib pajak, dan peningkatan koordinasi antar-OPD. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menggali sumber pendapatan baru agar PAD semakin optimal. Staf perencanaan dan penganggaran menambahkan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari evaluasi terus-menerus, penyesuaian kebijakan, dan penyusunan target yang lebih realistis.

Dari sisi audit internal, efektivitas PAD yang membaik mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin akuntabel. Auditor menekankan pentingnya peningkatan transparansi, pengawasan pemungutan PAD, dan inovasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Secara keseluruhan, capaian efektivitas PAD Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tren yang positif. Awalnya, kinerja fiskal tergolong kurang efektif, namun dengan strategi yang lebih tepat dan perbaikan sistemik, realisasi PAD mampu melampaui target. Keberhasilan ini sejalan dengan teori Halim (2011) tentang

efektivitas fiskal daerah dan diperkuat oleh temuan Sutrisno dan Wibowo (2018) yang menyoroti pentingnya strategi pengelolaan dalam meningkatkan efektivitas PAD. Untuk mempertahankan capaian ini, pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat sistem digitalisasi, serta menggali potensi dari sektor-sektor ekonomi lokal yang belum maksimal dikelola.

Pembahasan Rasio Varians Belanja

Rasio varians belanja mencerminkan kesesuaian antara anggaran belanja dan realisasinya. Selisih negatif menunjukkan under-spending yang dapat menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik. Di Bone Bolango, rasio varians belanja selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi.

Tahun 2021 mencatat varians sebesar -8%, dengan serapan anggaran yang rendah akibat kendala pelaksanaan program dan lemahnya kapasitas teknis. Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi -14%, dipengaruhi oleh proses administrasi yang lambat serta penyesuaian kebijakan pusat. Namun, perbaikan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan varians hanya -5%, mencerminkan perencanaan yang lebih realistis dan koordinasi yang membaik antar OPD.

Menurut Kepala Badan Keuangan dan staf perencanaan, hambatan teknis dan administratif menjadi faktor utama rendahnya realisasi belanja. Meski begitu, upaya perbaikan telah dilakukan melalui percepatan pengadaan dan peningkatan koordinasi. Auditor internal menilai selisih anggaran masih dalam batas wajar, namun perencanaan ke depan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar lebih akurat dan efisien.

Hasil ini sejalan dengan teori Halim (2016) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran meningkat ketika selisih antara anggaran dan realisasi mengecil. Penelitian Putri dan Santoso (2019) juga mendukung temuan ini, dengan menyebutkan bahwa banyak daerah di Indonesia mengalami kesulitan menyerap anggaran akibat kendala administratif dan perubahan kebijakan.

Secara keseluruhan, meskipun Bone Bolango masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi belanja, tren perbaikannya menunjukkan arah yang positif. Ke depan, perencanaan anggaran yang akurat, percepatan administrasi, dan pengawasan ketat diperlukan agar belanja daerah benar-benar efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran belanja sesuai rencana. Menurut Mahmudi (2016), efisiensi dicapai ketika realisasi belanja mendekati anggaran tanpa melebihinya, menandakan pengelolaan fiskal yang disiplin dan tepat sasaran.

Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan kinerja efisiensi belanja yang cukup baik. Tahun 2021 mencatat efisiensi sebesar 91% (sangat efisien), menandakan realisasi anggaran yang hampir optimal. Namun, sisa 9% menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana, sehingga dibutuhkan pengelolaan lanjutan seperti penjadwalan ulang.

Pada 2022, rasio menurun menjadi 85%, meskipun masih tergolong efisien. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam implementasi anggaran seperti

keterlambatan administrasi, hambatan teknis, dan penyesuaian kebijakan. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih realistis dan koordinasi lintas-OPD yang lebih solid.

Tahun 2023 memperlihatkan perbaikan signifikan dengan efisiensi mencapai 94%, menandakan peningkatan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan disiplin pelaksanaan program melalui penguatan kelembagaan dan sistem monitoring.

Beberapa pejabat daerah memberikan pandangan terkait dinamika ini. Kepala BPKD mengakui bahwa penurunan efisiensi disebabkan oleh revisi kebijakan dan hambatan teknis, namun telah dilakukan upaya perbaikan seperti percepatan pencairan dana dan peningkatan koordinasi. Staf perencanaan menambahkan bahwa pembelajaran dari tahun sebelumnya digunakan untuk menyusun anggaran yang lebih realistis dan fokus pada evaluasi berkala. Dari sisi audit, fluktuasi efisiensi dianggap wajar, namun perbaikan sistem pengelolaan anggaran tetap diperlukan melalui transparansi, perencanaan akurat, dan optimalisasi sumber daya.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan tren positif dalam efisiensi belanja daerah meskipun ada penurunan pada satu periode. Upaya seperti digitalisasi anggaran, perencanaan yang lebih matang, serta penguatan koordinasi dan evaluasi menjadi kunci perbaikan ke depan. Temuan ini sejalan dengan konsep efisiensi Mahmudi (2016), dan konsisten dengan studi Rahmawati & Sugiarto (2020) yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran daerah kerap fluktuatif namun dapat ditingkatkan melalui reformasi sistem pengelolaan fiskal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tren perbaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Varians pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan perbaikan dari realisasi di bawah target pada 2021 dan 2022 menjadi melebihi target pada 2023, yang mencerminkan strategi pengelolaan pendapatan yang semakin baik. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat secara konsisten, dari 80% pada 2021 menjadi 103% pada 2023, menandakan optimalisasi sumber pendapatan dan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Meski realisasi belanja daerah masih lebih rendah dari anggaran, terdapat peningkatan efektivitas penyerapan anggaran pada 2023 setelah mengalami penurunan di 2022, sementara efisiensi belanja tetap terjaga dalam kategori efisien dengan tren peningkatan disiplin penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Partisipatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Badrudin, R. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Charles, L. (2019). *Teori dan Praktik Anggaran Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firdausy, C. M. (2017). *Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah: Analisis Ekonomi Regional*. Jakarta: LP3ES.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muindro Renyowijoyo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muindro Renyowijoyo. (2013). *Penganggaran di Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riyanto, B. (2017). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Siahaan, E. (2005). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.